



## Analisis Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

Antonius Narang Eong <sup>1\*</sup>, Maria Nona Dince <sup>2</sup>, Emilianus Eo Kutu Goo <sup>3</sup>,  
Marselus Don Bosko <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat: Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Tim., Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Tim. 86094

Korespodensi email : [emilyogowic@gmail.com](mailto:emilyogowic@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze internal control over drug inventory at the Sikka District Health Office. The method used in this study is a qualitative descriptive method, the sample in this study is the Pharmacist section at the Sikka District Health Office. The data collection method in this study is interviews and documentation which are then analyzed using the Miles and Huberman theory and adjusted to the existing data. The results of this study indicate that at the Sikka District Health Office, the use of SOPs for controlling drug inventory shows a commitment to creating a healthy control environment. The Sikka District Health Office has emphasized the importance of creating Standard Operating Procedures (SOPs) for all stages of drug inventory control from planning to recording and reporting. This shows a commitment to ensuring that the drug inventory management process is carried out in a structured and efficient manner, with detailed SOPs for each step. In the field of Supervision, Monitoring of drugs in relation to the internal control system at the Sikka District Health Office is carried out through monthly stock opname by checking the conformity between stock cards, physical goods, and reporting. This process reflects an effort to regularly monitor and evaluate the condition of drug inventory. The Sikka District Health Office can identify any discrepancies or inconsistencies that may indicate problems in inventory management. This step allows them to immediately take necessary corrective actions, such as further investigation or inventory adjustments, to ensure that drug inventory remains well-managed and accurate.*

**Keywords:** Control, Supplies, Health, Sikka

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal terhadap persediaan obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sampel dalam penelitian ini adalah bagian Apoteker pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi yang kemudian di analisis menggunakan teori Miles dan Huberman dan disesuaikan dengan data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Penggunaan SOP untuk pengendalian persediaan obat-obatan menunjukkan komitmen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang sehat. Dinas Kesehatan kabupaten Sikka telah menegaskan pentingnya pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua tahap pengendalian persediaan obat-obatan dari perencanaan hingga pencatatan pelaporan. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan proses manajemen persediaan obat-obatan dilakukan secara terstruktur dan efisien, dengan SOP yang terinci untuk setiap langkah. Dalam bidang Pengawasan, Pemantauan obat-obatan dalam kaitan dengan system pengendalian internal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dilakukan melalui stok opname bulanan dengan memeriksa kesesuaian antara kartu stok, fisik barang, dan pelaporan. Proses ini mencerminkan upaya untuk secara teratur mengawasi dan mengevaluasi keadaan persediaan obat-obatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat mengidentifikasi adanya perbedaan atau ketidakcocokan yang mungkin mengindikasikan masalah dalam pengelolaan persediaan. Langkah ini memungkinkan mereka untuk segera mengambil tindakan korektif yang diperlukan, seperti penyelidikan lebih lanjut atau penyesuaian inventaris, untuk memastikan bahwa persediaan obat-obatan tetap terkelola dengan baik dan akurat.

**Kata kunci:** Pengendalian, Persediaan, Kesehatan, Sikka

### 1. PENDAHULUAN

Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga untuk periode

satu tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (*medium term expenditure framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*unified budget*), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*performance budget*). Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran (*planning and budgeting*).

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan penganggaran. Namun hingga saat ini proses penyusunan perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dapat terlaksana sesuai harapan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh para perencana setiap tahun diantaranya adalah sulitnya sinkronisasi dan koordinasi antar unit serta waktu perencanaan yang terkesan singkat atau tergesa-gesa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka para perencana diharapkan dapat memahami siklus dan jadwal serta kegiatan umum perencanaan dan penganggaran. Hal ini untuk memudahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) di tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN). Perhatian ditekankan pada sinkronisasi antara Pusat dan Daerah khususnya untuk Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP). Dengan mengetahui dan memahami siklus dan jadwal penyusunan serta kegiatan umum perencanaan APBN ini, diharapkan dapat Menyusun perencanaan dengan baik dan tepat waktu.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu organisasi sektor publik dituntut untuk menghadapi tekanan agar lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Aktifitas utama dari Dinas Kesehatan adalah memberikan pelayanan dan perawatan, salah satunya di persediaan obat. Perhatian terhadap persediaan obat-obatan di Dinas Kesehatan sangat penting, karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan suatu Dinas Kesehatan sehingga dengan tersedianya persediaan obat-obatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa Dinas Kesehatan (pasien). Pengelolaan obat pada Dinas Kesehatan bertujuan untuk menjamin kelangsungan,

ketersediaan, dan keterjangkauan obat yang efisien, efektif dan rasional. Dimana pengendalian obat merupakan kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar.

Organisasi sektor publik merupakan sektor pelayanan yang menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah penyediaan pelayanan yang bersifat monopolistik, yang dipandang sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat. Menurut PP No 51 tahun 2009, apotek menjalankan fungsi sebagai sarana pelayanan kefarmasian berupa penjualan atas obat-obatan yang sangat rentan untuk mengalami kerusakan, pencurian dan kadaluarsa. Penerapan pengendalian internal atas persediaan obat dalam Puskesmas Bahu sudah ada tapi belum diketahui apakah sudah dilaksanakan atau sudah diterapkan dalam persediaan obat tersebut.

Pengendalian Internal merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan bahkan instansi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pengendalian internal diperlukan untuk melakukan tindakan pengamanan dimana bertujuan agar bisa mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, maupun tindakan penyimpangan lainnya. Selain itu, pengendalian internal ditujukan agar semua aturan yang ditetapkan dilaksanakan oleh semua staff organisasi (Daos dan Angi, 2019).

Committeeof Sponsoring Organizationatau disingkat (COSO), adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan buat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Pengendalian internal menurut Committeeof Sponsoring Organization (COSO) dibagi kedalam lima komponen yaitu, lingkungan pengendalian, penetapan risiko, aktifitas pengendalian, informasi, dan komunikasi serta pengawasan (Suryani, 2019). Oleh karena itu setiap organisasi, perusahaan maupun instansi perlu menjalankan pengendalian internal agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan pengendalian internal menurut PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan oerorganisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut (Makikui et al., 2017), salah satu jenis pengendalian yang harus dilakukan pada sebuah organisasi adalah pengendalian terhadap persediaan, karena persediaan merupakan salah satu sumber pemasukan. Dan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 14 (2014), Persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset dalam proses produksi atau dalam perjalanan, dan aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 5 peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, instansi dinas kesehatan yang memiliki persediaan obat diperlukan pengendalian internal untuk melindungi persediaan obat tersebut dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai persediaan obat.

Pengendalian internal persediaan juga sangat memiliki arti penting, dimana pengendalian internal bisa menjaga ketersediaan persediaan dan juga dapat menargetkan kapan persediaan tersebut habis dan kapan persediaan perlu diperbaharui. Pengelolaan persediaan obat pada Dinas Kesehatan sangatlah penting karena persediaan tersebut akan di supplies ke pelayanan kesehatan yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan seperti Puskesmas, Polindes, dan juga Apotik yang dibangun oleh pemerintah yang dimana menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dan dituntut untuk selalu efisien dalam memberikan pelayanan dan perawatan terhadap masyarakat.

Penelitian tentang analisis pengendalian internal terhadap persediaan obat telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Menurut Djuhari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat-Obatan Pada UPTD Puskesmas Puncu” menyatakan bahwa hasil penelitian ini menampilkan bahwa sistem pengendalian internal pada UPTD Puskesmas Puncu telah berjalan baik dengan didukung oleh tata nilai yang telah ditetapkan oleh organisasi. Puskesmas Puncu menggunakan tata nilai PERMATA (profesional, empati, ramah, memuaskan, aktif tanggap dan aman) sebagai landasan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal.

Priyastiwi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat (Studi Kasus Di Apotek Mukti)” menunjukkan bahwa apotik mukti telah menerapkan sebagian besar pengendalian internal atas persediaan obat yang sesuai dengan standar pengendalian internal menurut COSO (Committee Of Sponsoring

Organization). Komponen yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu lingkungan pengendalian.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eriswanto (2020) dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Persediaan Obat (Studi Kasus di Puskesmas Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa Puskesmas Bojonggenteng sudah menerapkan sebagian besar pengendalian internal namun, belum memiliki dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pengendalian internal persediaan selain itu puskesmas telah membentuk struktur organisasi namun masih terdapat rangkap fungsi yang dilakukan karyawan pengelolaan persediaan yang ada di puskesmas tidak lepas dari berbagai resiko yang mungkin terjadi.

Dari uraian ketiga penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama mengukur penerapan pengendalian internal. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitiannya dimana menurut Djuhari (2011) menggunakan tata nilai PERMATA (profesional, empati, ramah, memuaskan, akif, tanggap dan aman, menurut Priyastiwi (2021) komponen yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu lingkungan pengendalian, dan menurut Eriswanto (2020) belum memiliki dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pengendalian internal persediaan.

Dari beberapa penelitian diatas penulis ingin menguji kembali dengan penelitian dari penulis dengan judul Pengendalian Internal atas Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah periode waktu terbaru yaitu 2023 dan tempat penelitiannya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang beralamat Jalan Eltari Maumere merupakan instansi yang bertanggung jawab mengenai kesehatan dan memiliki tugas untuk perumusan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi bidang kesehatan dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan.

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dalam pengendalian internal, jika dilihat berdasarkan COSO (Committee Of Sponsoring Organization), komponen yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu lingkungan pengendalian yaitu prosedur pengelolaan persediaan awal, penerimaan persediaan, pengeluaran persediaan dan sisa akhir persediaan. Berdasarkan data laporan tahunan ketersediaan obat Gudang Farmasi Kesehatan (GFK) Sikka tahun 2017 - 2021 (data terlampir) dapat dilihat bahwa total obat Gudang banyak tersisa, sehingga persediaan obat tersebut diedarkan ke rumah sakit (RS) atau puskesmas.

Untuk setiap tahunnya terdapat stok obat yang berlebih dan *expired*. Stok obat yang *expired* akan dilakukan pemusnahan sehingga hal ini perlu adanya perencanaan yang baik agar stok obat pada gudang tidak berlebihan dan sesuai dengan standar serta prosedur yang berlaku pada Dinkes Kabupaten Sikka.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mengetahui kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui sistem pengendalian internal persediaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang beralamat di Jalan Eltari Maumere Kecamatan Alok. Waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan yaitu terhitung dari tanggal 28 Februari sampai 28 Maret 2024

### **Analisis Data**

Miles dan Huberman (1984:133), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*). Sejumlah peneliti kualitatif berupaya mengumpulkan data selama mungkin dan bermaksud akan menganalisis setelah meninggalkan lapangan. Cara tersebut untuk peneliti kualitatif salah, karena banyak situasi atau konteks yang tak terekam dan peneliti lupa penghayaan situasinya, sehingga berbagai hal yang terkait dapat berubah menjadi fragmen-fragmen tak berarti. Sehingga pekerjaan pengumpulan data bagi peneliti kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan; yang selanjutnya Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap:

#### **a. Tahap Reduksi Data**

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah : Pertama, meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan. Kedua, pengkodean. Pengkodean

hendaknya memperhatikan setidaknya-tidaknya empat hal. Digunakan simbol atau ringkasan, kode dibangun dalam suatu struktur tertentu, kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu dan keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif. Ketiga, dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif. Keempat, membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terpikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif Kelima, membuat catatan marginal.

Miles dan Huberman memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan marginal. Keenam, penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidaknya-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pemberian label, mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu serta menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik. Ketujuh, analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposisi. Kedelapan, analisis antarlokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti.

Pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan lainnya, perlu dilakukan. Kesembilan, pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi. Mencermati penjelasan di atas, seorang peneliti dituntut memiliki kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan serta kedalaman wawasan yang tertinggi.

Berdasarkan kemampuan tersebut peneliti dapat melakukan aktivitas reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Bagi peneliti pemula, proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

b. Tahap Penyajian Data/ Analisis Data

Setelah Pengumpulan Data Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman (1984:133) memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram konteks (*context chart*) dan matriks. Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan- tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the post has been narrative text*" yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan tabel, grafiks, amatriks dan semacamnya bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan kata atau phase verbal. Dalam bukunya *Qualitative Data Analisis* disajikan mengenai model-model penyajian data untuk analisis kualitatif. Miles dan Huberman dengan model-modelnya itu dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas membuat modelnya sendiri, bukan hanya sekedar konsumen model Miles dan Huberman.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti buat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan

bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan. Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu :

- 1) Mengecek representativeness atau keterwakilan data.
- 2) Mengecek data dari pengaruh peneliti.
- 3) Mengecek melalui triangulasi.
- 4) Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya.
- 5) Membuat perbandingan atau mengkontraskan data.
- 6) Menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif.

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan sistem pengendalian internal atas persediaan obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka ditinjau dari standar pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008**

##### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian merujuk pada konteks di mana suatu organisasi beroperasi, termasuk budaya, struktur, filosofi manajemen, dan nilai-nilai yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Ini mencakup kepatuhan terhadap kebijakan, pemisahan tugas yang jelas, nilai-nilai seperti akuntabilitas, dan kejujuran

yang menjadi dasar moral bagi sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian yang sehat menciptakan landasan kokoh bagi pencapaian tujuan organisasi. Ada point utama lingkungan pengendalian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, yaitu 1) Standar Operasional Prosedur sebagai landasan pengendalian, 2) Otorisasi dan Pemisahan Tugas, dan 3) Keterlibatan manajemen dan staf.

SOP merupakan instruksi tertulis yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu tugas atau proses. Dalam konteks Dinas Kesehatan kabupaten Sikka, penggunaan SOP untuk pengendalian persediaan obat-obatan menunjukkan komitmen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang sehat. COSO (2013) menekankan pentingnya SOP dalam membantu organisasi mencapai tujuan dengan memberikan panduan yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan proses. (COSO, 2013).

Adanya proses verifikasi oleh pimpinan sebelum pengeluaran obat dari gudang menunjukkan struktur otoritas yang jelas dan pemisahan tugas yang baik. COSO (2013) menyoroti pentingnya otorisasi sebagai salah satu elemen pengendalian internal yang memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan yang tepat. Selain itu, pemisahan tugas antara verifikasi dan pengeluaran obat membantu mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan yang dapat terjadi ketika satu individu memiliki kontrol penuh atas seluruh proses (COSO, 2013).

Melibatkan staf dalam proses penyiapan obat setelah melalui tahap verifikasi dan persetujuan oleh pimpinan menunjukkan adanya partisipasi aktif dari manajemen dan staf dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat. COSO (2013) menekankan pentingnya komunikasi dan keterlibatan dari semua pihak dalam menjaga efektivitas pengendalian internal. Dengan melibatkan staf, manajemen dapat memperkuat pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan (COSO, 2013).

Melalui pendekatan ini, Dinas Kesehatan kabupaten Sikka menegaskan komitmennya terhadap pengendalian internal yang kuat dalam manajemen persediaan obat-obatan. Dengan menerapkan SOP, otorisasi yang jelas, dan melibatkan manajemen serta staf dalam proses, lingkungan pengendalian yang sehat dapat diciptakan untuk memastikan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan persediaan obat-obatan.

PP No. 60 Tahun 2008 menekankan pentingnya pembentukan lingkungan pengendalian yang kondusif di dalam pemerintahan. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan

Kabupaten Sikka menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian mereka terstruktur dan didasarkan pada nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini sesuai dengan persyaratan PP No. 60 Tahun 2008 yang mewajibkan lembaga pemerintah untuk memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal.

#### **b. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi. Ini melibatkan mengidentifikasi berbagai ancaman dan peluang, menilai dampak dan probabilitas terjadinya risiko tersebut, serta menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Penilaian risiko membantu organisasi untuk memahami potensi dampak negatif dan positif dari risiko-risiko yang dihadapi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Terdapat 3 (tiga) point utama penilaian risiko pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, yaitu 1) identifikasi risiko dan komitmen untuk pengelolaan risiko, 2) Respon terhadap risiko, dan 3) Integrasi penilaian risiko dengan SOP.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka secara aktif mengidentifikasi risiko-risiko kritis terkait dengan penyimpanan obat-obatan, terutama memperhatikan faktor-faktor penting seperti suhu dan infrastruktur penyimpanan lainnya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dalam memahami dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan kondisi penyimpanan obat-obatan. COSO (2013) menekankan pentingnya organisasi untuk secara terus-menerus mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang ada untuk memastikan bahwa upaya pengendalian internal mereka tetap efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. (COSO, 2013).

Tindakan konkret seperti memastikan kestabilan suhu ruangan dan menyediakan genset sebagai cadangan saat pemadaman listrik menunjukkan respons yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka berdasarkan hasil penilaian risiko. Ini mencerminkan pemahaman akan potensi risiko kerusakan atau penurunan kualitas obat-obatan akibat fluktuasi suhu atau pemadaman listrik, dan upaya untuk mengelola risiko tersebut secara proaktif. COSO (2013) menyoroti pentingnya respons terhadap risiko sebagai salah satu aspek penting dari pengelolaan risiko yang efektif, yang mencakup penentuan strategi untuk mengelola risiko yang diidentifikasi. (COSO, 2013).

Penilaian risiko diintegrasikan dengan pembaharuan SOP setiap tahunnya, menunjukkan kesadaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka akan pentingnya memastikan bahwa penilaian risiko tetap relevan dan sesuai dengan perubahan kondisi atau faktor lingkungan. Ini mencerminkan komitmen terhadap keselamatan dan kualitas obat-obatan dengan menghubungkan penilaian risiko dengan upaya-upaya perbaikan secara keseluruhan. COSO (2013) menekankan pentingnya integrasi pengelolaan risiko dengan proses manajemen yang lebih luas dalam organisasi, seperti perencanaan strategis dan operasional, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. (COSO, 2013).

Dengan demikian, penilaian risiko di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka menunjukkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan penyimpanan obat-obatan, dengan integrasi yang kuat antara identifikasi risiko, respons terhadap risiko, dan pembaharuan SOP. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal yang ditekankan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

PP No. 60 Tahun 2008 menuntut agar lembaga pemerintah melakukan penilaian risiko secara teratur. Dalam konteks Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, penilaian risiko dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang krusial seperti suhu dalam penyimpanan obat-obatan. Praktik ini sesuai dengan persyaratan PP No. 60 Tahun 2008 yang mendorong lembaga pemerintah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi.

### **c. Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah tindakan konkret yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola risiko-risiko yang ada. Ini meliputi berbagai langkah, prosedur, kebijakan, dan praktik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampak negatifnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa risiko-risiko dapat dikelola dengan efektif sehingga organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih aman dan efisien. Terdapat 3 (tiga) point utama aktivitas pengendalian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, yaitu 1) Pemisahan tugas yang jelas, 2) Regulasi melalui SOP, dan 3) Sistem pelaporan internal yang rutin.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memastikan adanya pemisahan tugas dengan pembagian Penanggung Jawab (PJ) ruangan dan pembagian tugas pelaporan yang diatur dalam Surat Keputusan Pelaksanaan (SKP) masing-masing petugas Gudang.

Pembagian PJ ruangan membantu dalam memastikan bahwa tanggung jawab terkait dengan penyimpanan obat-obatan dipisahkan secara efektif antara berbagai ruangan atau bagian dalam Gudang. Sementara itu, pembagian tugas pelaporan yang tercantum dalam SKP masing-masing petugas Gudang memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya secara spesifik dan transparan. Dengan demikian, aktivitas pengendalian ini membantu dalam mengurangi risiko konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. (COSO, 2013).

Pengaturan seluruh proses dalam SOP untuk setiap tahapan menunjukkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dalam memastikan konsistensi, transparansi, dan efisiensi dalam manajemen persediaan obat-obatan. SOP memberikan panduan yang jelas bagi setiap langkah dalam pengendalian persediaan obat-obatan, yang membantu dalam mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memiliki sistem pelaporan internal yang dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada atasan, bahkan dalam situasi tertentu seperti Kejadian Luar Biasa (KLB), pelaporan dilakukan setiap hari terkait dengan stok obat-obatan. Implementasi sistem pelaporan yang teratur ini membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah atau kebutuhan yang mendesak, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan yang sesuai secara cepat dan efisien. Hal ini membantu memastikan bahwa persediaan obat-obatan tetap terkendali, terkelola dengan baik, dan dapat diakses dengan tepat pada setiap situasi. (COSO, 2013).

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memiliki pendekatan yang terstruktur dan proaktif dalam memastikan keamanan, kualitas, dan ketersediaan obat-obatan yang dikelola oleh mereka. Ini mencerminkan komitmen mereka terhadap standar pengendalian yang tinggi dan upaya untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah..

PP No. 60 Tahun 2008 menetapkan bahwa lembaga pemerintah harus melaksanakan aktivitas pengendalian yang efektif untuk mengelola risiko-risiko yang ada. Dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, aktivitas pengendalian dilakukan melalui pembagian tugas dengan jelas melalui SOP, sistem pelaporan internal yang rutin, dan pemastian adanya otorisasi dalam setiap proses pengeluaran obat dari gudang. Ini sesuai dengan persyaratan PP No. 60 Tahun 2008 yang menekankan pentingnya tindakan konkret dalam mengelola risiko-risiko.

**d. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal melibatkan aliran informasi yang efektif dan transparan di organisasi, serta proses komunikasi yang mendukung pencapaian tujuan dan pengelolaan risiko. Ini mencakup pertukaran informasi yang tepat antara manajemen dan karyawan, serta pemakaian sistem informasi yang handal untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik. Dengan komunikasi dan informasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mencegah kecurangan, dan mengatasi masalah dengan cepat. Terdapat 3 (tiga) point utama informasi dan komunikasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, yaitu 1) Laporan mutase sebagai sarana komunikasi, 2) Pertemuan koordinasi, dan 3) Rapat evaluasi kebijakan dan prosedur.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memastikan informasi terkait persediaan obat-obatan disampaikan secara jelas dan cepat melalui laporan mutasi yang dikirim setiap bulan kepada pihak-pihak terkait. Langkah ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk menjaga aliran informasi yang lancar dan transparan terkait dengan persediaan obat-obatan. Dengan mengirimkan laporan mutasi secara rutin, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat memberikan update yang terperinci tentang perubahan dalam persediaan obat-obatan kepada pihak yang membutuhkan, termasuk manajemen, staf gudang, dan pihak terkait lainnya. (COSO, 2013).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka mengadakan pertemuan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dengan pengelola obat di puskesmas untuk bertukar informasi dan menyampaikan pembaruan terkait kebijakan atau prosedur pengendalian. Pertemuan ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk memastikan aliran informasi yang efektif dan transparan antara berbagai unit organisasi. Melalui pertemuan ini, para petugas dapat bertukar informasi, menyampaikan pembaruan terkini, dan membahas masalah yang relevan. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dan puskesmas, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. (COSO, 2013).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menyampaikan informasi tentang perubahan dalam kebijakan atau prosedur pengendalian melalui rapat evaluasi baik di bidang maupun dengan pengelola obat di puskesmas. Praktik ini mencerminkan upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk memastikan bahwa semua pihak terinformasi tentang perubahan yang relevan dalam kebijakan atau prosedur pengendalian. Dengan

menyelenggarakan rapat evaluasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk bertukar informasi, memberikan masukan, dan memahami dampak perubahan tersebut. (COSO, 2013).

Dengan melakukan langkah-langkah ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah menunjukkan komitmen untuk menjaga aliran informasi yang efektif dan transparan di seluruh organisasi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal yang ditekankan oleh COSO, yang menekankan pentingnya pertukaran informasi yang tepat dan sistem informasi yang handal untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik. Hal ini sejalan dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

PP No. 60 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa lembaga pemerintah harus memastikan aliran informasi yang efektif dan transparan di dalam organisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka mencapai hal ini dengan menyampaikan informasi terkait persediaan obat-obatan secara jelas dan cepat melalui laporan mutasi bulanan dan pertemuan koordinasi dengan puskesmas. Ini sesuai dengan persyaratan PP No. 60 Tahun 2008 yang menuntut agar informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal berjalan lancar.

**e. Pemantauan**

Pemantauan dalam sistem pengendalian internal adalah proses untuk secara terus-menerus mengawasi dan mengevaluasi efektivitas operasional dari kontrol internal yang telah ditetapkan. Ini melibatkan peninjauan terhadap kegiatan sehari-hari untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur pengendalian tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan. Pemantauan juga melibatkan identifikasi dan penanganan masalah atau pelanggaran yang terdeteksi selama proses pemantauan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal terus berfungsi secara efektif dan dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi. Terdapat 3 (tiga) point utama pemantauan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, yaitu 1) Pemantauan melalui stock opname bulanan, 2) Pemantauan menggunakan indikator kinerja, dan 3) Audit internal berdasarkan SOP.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memastikan pemantauan efektif terhadap persediaan obat-obatan melalui stok opname bulanan. Prosedur ini melibatkan pengecekan kesesuaian antara kartu stok, fisik barang, dan pelaporan. Dengan membandingkan data yang tercatat dalam kartu stok dengan jumlah fisik barang yang

ada dan pelaporan yang disampaikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat mengidentifikasi adanya perbedaan atau ketidakcocokan yang mungkin mengindikasikan masalah dalam pengelolaan persediaan. Langkah ini memungkinkan untuk segera mengambil tindakan korektif yang diperlukan. (COSO, 2013).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menggunakan indikator kinerja untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Setelah stok opname dilakukan, dilakukan kajian untuk mengevaluasi kinerja pengendalian internal. Praktik ini mencerminkan komitmen untuk secara sistematis mengevaluasi kinerja pengendalian internal dan mengukur keberhasilannya. Informasi yang diperoleh dari kajian tersebut dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan manajemen dan memperbaiki proses-proses yang ada. (COSO, 2013).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka melakukan pemantauan melalui respon dengan melakukan audit internal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat. Audit internal membantu dalam mengidentifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, serta mengidentifikasi potensi kelemahan atau ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan. Melalui audit internal, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat memastikan bahwa pengendalian internal berjalan sesuai dengan harapan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. (COSO, 2013).

Dengan menerapkan pemantauan yang terstruktur melalui stok opname bulanan, indikator kinerja, dan audit internal berdasarkan SOP, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah secara efektif mengevaluasi efektivitas pengendalian, mengidentifikasi kelemahan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Ini mencerminkan komitmen mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan persediaan obat-obatan mereka. Hal ini sejalan dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

PP No. 60 Tahun 2008 menekankan pentingnya pemantauan terhadap sistem pengendalian internal secara terus-menerus. Dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, pemantauan dilakukan melalui stok opname bulanan, indikator kinerja, dan audit internal berdasarkan SOP. Praktik ini sesuai dengan persyaratan PP No. 60 Tahun 2008 yang menuntut agar lembaga pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal secara berkala.

Dengan memperhatikan PP No. 60 Tahun 2008, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah memastikan bahwa praktik pengelolaan persediaan obat-obatan mereka sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Hal

ini menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam organisasi pemerintahan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah berhasil membangun dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan persediaan obat-obatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, dimana:

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan lingkungan pengendalian yang sehat. Mereka memastikan adanya SOP yang terinci dan komitmen terhadap kontrol kualitas dan keamanan dalam manajemen persediaan obat-obatan.
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka secara aktif mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang terkait dengan penyimpanan obat-obatan, seperti masalah suhu dan pemadaman listrik. Tindakan proaktif ini mencerminkan upaya mereka untuk memahami dan mengelola risiko-risiko potensial dengan baik.
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah mengimplementasikan aktivitas pengendalian yang efektif, seperti pembagian tugas yang jelas, pembuatan SOP terinci, dan proses verifikasi sebelum pengeluaran obat. Langkah-langkah ini membantu mengurangi risiko konflik kepentingan dan kesalahan dalam pengelolaan persediaan obat-obatan.
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memastikan aliran informasi yang lancar dan transparan terkait dengan persediaan obat-obatan melalui laporan mutasi bulanan dan pertemuan rutin dengan pengelola obat di puskesmas. Praktik ini mendukung komunikasi yang efektif dan memastikan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan tantangan di lapangan.
- e. Dengan melakukan stok opname bulanan, menggunakan indikator kinerja, dan melakukan audit internal sesuai SOP, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka secara terus-menerus memantau efektivitas pengendalian internal. Praktik ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi perbedaan atau kelemahan yang memerlukan perbaikan segera.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan obat-obatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka perlu memperkuat kesadaran risiko melalui pelatihan kepada staf, memperbaiki proses pemantauan dengan meningkatkan frekuensi audit internal dan penggunaan indikator kinerja yang lebih komprehensif, mengembangkan sistem informasi yang lebih canggih, meningkatkan komunikasi antara unit organisasi, melakukan pelatihan rutin bagi karyawan, dan secara berkala mengevaluasi serta memperbarui SOP sesuai dengan perkembangan terbaru. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat meningkatkan pengendalian internal dan kinerja dalam pengelolaan persediaan obat-obatan.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat fokus pada analisis lebih mendalam terhadap efektivitas implementasi SOP dalam pengelolaan persediaan obat-obatan serta eksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap SOP, dengan tambahan penelitian terkait penggunaan teknologi informasi dan evaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan persediaan obat-obatan.

## **Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini termasuk cakupan yang terbatas pada satu instansi Kesehatan saja yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, sehingga generalisasi temuan terbatas.
- b. Keterbatasan waktu dan sumber daya mempengaruhi kedalaman analisis serta eksplorasi faktor-faktor yang lebih luas yang dapat memengaruhi efektivitas pengendalian persediaan obat-obatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, A. A., Anwar, A., Azis, F., & Akuntansi, J. (n.d.). Analisis pengendalian internal atas persediaan obat dan alat kesehatan pada apotek. *Bongaya Journal of Research in Accounting*, 6.
- Aditya Pangadda, R., & Atmanto, D. (2015). Analisis sistem dan prosedur persediaan obat-obatan dalam upaya mendukung pengendalian intern (Studi pada Rumah Sakit Islam Unisma Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 27(2).
- Buku sistem akuntansi. (n.d.).

- dan Siti Suryani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia Jalan Jend Yani, F. A. (2017). Analysis of internal control of trade in goods inventories Toko Utama Security CCTV Pekanbaru. *I(2)*.
- Dika, T. R., Langgeng N, A., & Alfian, M. (n.d.). Analisis sistem pengendalian intern atas persediaan obat pada Apotek Gajah Mada Tegal.
- Gesah, R., Prabowo, M., Rahmawati, S., & Tulungagung, U. (n.d.). Analisis sistem pengendalian internal atas persediaan barang jadi pada Gallery Maya Project. *Journal of Accounting and Tax*.
- Irman, M., Rini, D., Sekolah, A., Ilmu, T., Pelita, E., Jalan, I., & Yani, J. A. (n.d.). Analisis sistem pengendalian internal terhadap persediaan barang dagang pada PT. Abetama Sempurna Pekanbaru.
- Kadek Oktaviani, N., Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., Pariwisata, dan, Hindu Indonesia Jl Sangalangit, U., Denpasar Tim, K., & Denpasar, K. (n.d.). Analisis pengendalian internal atas persediaan obat pada Apotek Star Medika Abianbase Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati.
- Lawang SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Gelar Sarjana Ekonomi, W., & Purwati, H. (n.d.). Analisis sistem pengendalian internal atas persediaan obat (Studi Kasus pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman).
- Maruf, J. M., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2019). Analisis pengendalian internal atas persediaan obat pada organisasi sektor publik di Puskesmas Bahu. *Jurnal EMBA*, 7(3), 3099–3108.
- Najiyah, Y., Eriswanto, E., Kartini, T., Akuntansi, P., & Ekonomi, F. (n.d.). Analisis sistem pengendalian internal atas persediaan obat (Studi Kasus di Puskesmas Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi). *9(2)*.
- Penelitian, L., Penerbitan, D., Penelitian, H., & Ekonomipersada Bunda, S. (2019). Sistem pengendalian intern persediaan barang dagang pada PD. Mutiara Jaya Resti Riandi. *1*. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Republic Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Saputra, D., & Abrar. (2022). Analisis pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan obat pada apotek di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 12(1), 23–33. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3189>
- Skripsi Oleh, A. (n.d.). Analisis pengendalian internal prosedur penerimaan kas pada Klinik Az-Zahro Sumenep.
- Sudiarto, E., Kurniawan, D., Djuhari, D., Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkuçeçwara, S., & Timur Alamat Korespondensi, J. (n.d.). Makna pengendalian internal atas persediaan obat-obatan di Puskesmas Puncu.